



**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K I P)**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Tas rahmat dan KaruniaYa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Barat Daya dapat disusun. Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024-2029.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan perwujudan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan serta tingkat kinerja yang dicapai dalam pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta cara pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 ini merupakan media pertanggung jawaban yang dibuat secara periodik yang berisikan informasi mengenai kinerja instansi pemerintah untuk mendorong perangkat daerah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar.

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan organisasi, maka diuraikanlah kedalam suatu program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Sumba Barat Daya. Kemudian untuk mengukur sejauh mana capaian indikator kinerja sasaran,, kinerja program dan kegiatan, serta target, realisasi dan kebijakan di tahun 2025, maka dilakukan melalui evaluasi rencana strategis, rencana kinerja tahunan, pengukuran kinerja kegiatan, pengukuran pencapaian sasaran dan pelaksanaan anggaran serta realisasi APBD pada Tahun Anggaran 2025.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
PERNYATAAN TELAH DI REVIEW	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP	2
C. PROFIL PEMERINTAH KABUPATEN SBD	2
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN	7
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 1
A. PERENCANAAN STRATEGIS	1
1. Pernyataan Visi	1
2. Pernyataan Misi	2
3. Penetapan Tujuan	2
4. Penetapan Sasaran	3
5. Penetapan Program	3
B. PERJANJIAN KINERJA	5
C. PERENCANAAN ANGGARAN	9
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 1
A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	1
B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	1
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN (ALOKASI DAN REALISASI)	1
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	1
E. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	8
 BAB IV PENUTUP	 1
A. SIMPULAN	1
B. SARAN	1
 LAMPIRAN – LAMPIRAN :	
1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
2. PENCAPAIAN PENGUKURAN SASARAN (PPS)	
3. RENCANA STRATEGIS (RS)	
4. PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (PRKT) 2024	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana tertuang dalam Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025, bahwa visi yang diemban adalah sesuai dengan visi Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu **"terwujudnya stabilitas keamanan, integrasi bangsa, dan tata kelola pemerintahan yang kondusif. Misi utamanya meliputi penguatan ideologi Pancasila, peningkatan wawasan kebangsaan, pembinaan politik demokratis, serta peningkatan kewaspadaan dini terhadap konflik sosial untuk menciptakan situasi kondusif di tingkat daerah"**

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut diambil langkah-langkah kegiatan yang dituangkan kedalam misi Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu :

1. Misi pertama "Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Sumba Barat Daya yang di capai dengan kelengkapan Sarana dan Prasarana yang berkualitas".
2. Misi kedua "Melanjutkan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis, Akuntabel, Bersih, Efektif dan Terpercaya".
3. Misi ketiga "Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Sumba Barat Daya yang Sejahtera.
4. Misi keempat "Melaksanakan Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Formal;
5. Misi kelima "Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Aparatur".
6. Misi keenam "Melestarikan dan Mengoptimalkan Potensi Alam serta Seni Budaya".
7. Misi ketujuh "Meningkatkan Kewaspadaan Nasional dan ketertiban Masyarakat".

Dalam kerangka pembangunan *"good governance"* kebijakan umum pemerintah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil akan fokus pada kesehatan masyarakat, berupaya untuk menghasilkan *"output"* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* dan *outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja,

untuk mengukur sampai sejauh mana kinerja kegiatan, program dan kebijakan tahun 2024, dilakukan melalui Evaluasi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Pengukuran Kinerja Kegiatan, Pengukuran Pencapaian Sasaran dan Pelaksanaan Anggaran serta Realisasi APBD Tahun 2025.

Dengan mengetahui tingkat kinerja yang dicapai, capaian anggaran serta tingkat keberhasilan dan kegagalannya pada Tahun 2025 maupun di Tahun yang lalu, diharapkan dapat dijadikan bahan informasi bagi Pimpinan dan seluruh staf dalam pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan pada tahun yang akan datang.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran antara lain terbatasnya kompetensi dan kualifikasi staf / SDM untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi; kurangnya sarana dan prasarana dan arah kebijakan anggaran yang belum berpihak pada prioritas pencapaian sasaran. Untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Barat Daya dalam mencapai sasaran di semua bidang, upaya-upaya yang dilakukan adalah :

1. Penempatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Pemenuhan kebutuhan SDM dan sarana prasarana kerja yang memadai, terutama gedung kantor dan peralatan gedung kantor agar pelaksanaan kerja dapat berjalan dengan baik.
3. Arah kebijakan anggaran harus di fokuskan dan diprioritaskan pada pencapaian sasaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Barat Daya.
4. Penataan basis data dan informasi baik ormas/ LSM, Partai Politik, dan data-data lain yang berhubungan dengan urusan kesatuan bangsa dan politik untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dengan mengetahui capaian kinerja, capaian anggaran serta tingkat keberhasilan dan kegagalan baik pada tahun ini maupun tahun yang lalu, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi pimpinan dan seluruh staf untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Badan Kesbangpol Kabupaten Sumba Barat Daya di Tahun tahun yang akan datang.

Tambolaka, 26 Januari 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,



Ir. HERMAN GONDATE, M.Si

Pembina Utama Muda IV/c

NIP.19660908 199303 1 013

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai tindak lanjut dari ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tersebut, Pemerintah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (JDIH BPK RI).

Azas akuntabilitas sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang tersebut adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang secara struktural adalah sebagai penyelenggara pemerintahan pada daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat daerah otonom menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat yang berlandaskan peraturan perundang-undangan.

Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya mempunyai tugas pokok membantu Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat serta memberikan pelayanan menyangkut Kesatuan Bangsa dan Politik.

Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Barat Daya wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya dalam bentuk Laporan Tahunan.

B. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP

Tujuan dan manfaat penyusunan LKIP, sesuai amanat Perpres No. 29 Tahun 2014 dan Permen PAN-RB 53 Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan pembuatan LKIP yaitu:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

2. Manfaat

Manfaat pembuatan LKIP yaitu:

- a. Mendorong instansi pemerintah, untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan (dan pembangunan) secara baik dan benar (*good governance*).
- b. Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- c. Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- d. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

C. PROFIL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

1. Dasar Hukum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- b. Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Barat Daya berkedudukan sebagai unsur Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

2. Aspek Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Tugas Pokok

- 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat serta memberikan pelayanan menyangkut Kesatuan Bangsa dan Politik.

b. Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan.
- 2) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik.
- 3) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- 4) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.
- 5) Pelaksanaan Tugas Ketatausahaan
- 6) Pelaksanaan tugas –tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Barat Daya sesuai Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 sebagai berikut :
Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tahun 2022 sebagai berikut :

a. Kepala Badan

a. Sekretariat terdiri dari :

- 1) Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
- 2) Perencana Ahli Muda
- 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

b. Bidang Bidang Ekonomi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa membawahi :

1. Sub Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan.
2. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.

c. Bidang Politik Dalam Negeri membawahi :

1. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi.
2. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

d. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat membawahi :

1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
2. Sub Bidang Organisasi Masyarakat

e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Membawahi :

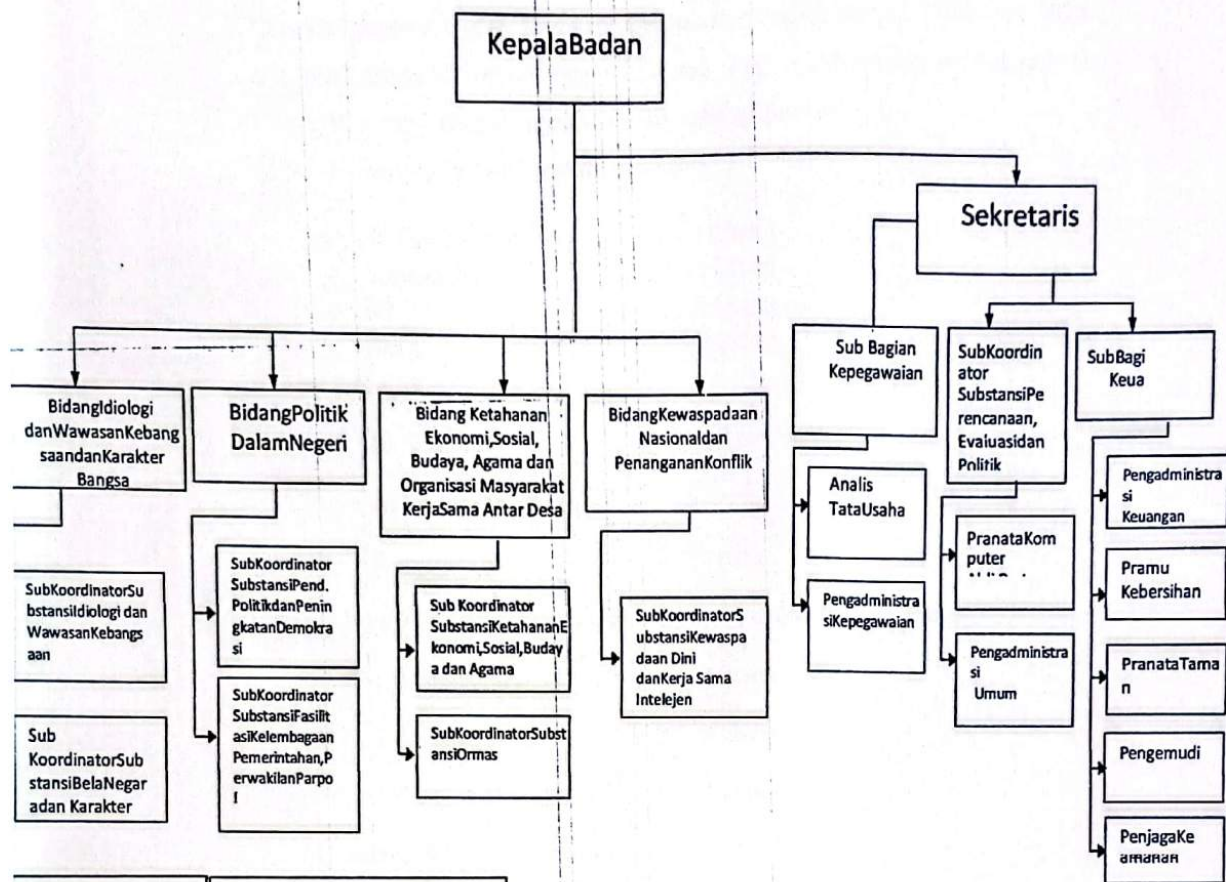
1. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
2. Sub Bidang Penanganan Konflik Sosial

f. Unit Pelaksana Teknis Badan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sesuai Perbup Nomor : 43 Tahun 2022 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. (Bagan Struktur Organisasi Terlampir)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2025
"Membangun Desa dan Menata Kota"



EKUIPTAN PEGAWAI

/c = 1
/a = 4
/d = 2
/b = 2
/a = 1
PPK = 5

Keterangan 16 Orang terdiri dari

✓ Eselon II : 1 Orang
✓ Eselon III : 4 Orang
✓ Eselon IV : 5 Orang
✓ Staf PNS : 5 Orang
Total : 15 Orang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2025
“Membangun Desa dan Menata Kota”

4. Sumber Daya Aparatur Pegawai

Keadaan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai Desember 2025 saat ini sebanyak 16 orang yang terdiri dari PNS struktural 6 orang Fungsional Umum 10 orang orang, dengan perincian sebagai berikut :

a. Menurut latar belakang pendidikan:

- | | |
|----------------|------------|
| - Sarjana (S2) | : 1 Orang |
| - Sarjana (S1) | : 12 Orang |
| - D3 | : 2 Orang |
| - SMA | : 1 Orang |

b. Menurut golongan :

- | | |
|----------------|-----------|
| - Golongan II | : 5 orang |
| - Golongan III | : 6 orang |
| - Golongan IV | : 5 orang |

c. Yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan dan Perencanaan :

- | | |
|-----------------|-----------|
| - Diklatpim IV | : 4 orang |
| - Diklatpim III | : 3 orang |
| - Diklatpim II | : 1 orang |

d. Jumlah Jabatan Struktural :

- | | |
|----------------|-----------|
| - Eselon II/b | : 1 orang |
| - Eselon III/a | : 1 orang |
| - Eselon III/b | : 4 orang |
| - Eselon IV/a | : 3 orang |

5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Barat Daya sekarang ini adalah sebagai berikut: Keadaan sarana dan prasarana yang ada :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2025
"Membangun Desa dan Menata Kota"

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Alat- Alat Angkutan		
	a. Roda Empat	2 unit	1 Rusak Berat
	b. Roda Dua	6 unit	4 Baik, 2 Rusak Berat
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	a. Lemari Kayu	7 bh	6 Baik, 1 Rusak Berat
	b. Kursi Besi	4 bh	4 Rusak Berat
	c. Kursi Kayu	39 bh	Baik
	d. Kursi Plastik	21 bh	Rusak Berat
	e. Laptop/Notebook	6 bh	2 Baik, 4 Rusak Berat
	f. Komputer	6 bh	1 Baik, 5 Rusak Berat
	g. Kursi Pimpinan	1 bh	Baik
	h. Meja Pimpinan	1 bh	1 Rusak Berat
	i. Printer	12 bh	1 Baik, 11 Rusak Berat
	j. Meja Kerja	14 bh	11 Baik, 3 Rusak Berat
	k. Meja Komputer	2 unit	2 Rusak Berat

PERMASALAHAN UMUM

1. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Adanya jabatan struktural yang tidak terisi sehingga proses pelayanan tidak berjalan dengan maksimal

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pembuatan LAKIP diawali dengan kata pengantar, daftar isi dan ringkasan eksekutif, sebagai penuntun bagi pimpinan dan pihak yang berkepentingan untuk memperoleh gambaran singkat tentang informasi yang disampaikan oleh batang tubuh LAKIP. Sedangkan Batang Tubuh LAKIP dibagi 4 (empat) bab yang meliputi :

BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini menguraikan Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat LAKIP, profil bagian organisasi dan Sistematika Penyajian LAKIP.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab II ini menyajikan Perencanaan Kinerja yang meliputi Pernyataan Visi Misi, Penetapan Tujuan dan Penetapan Sasaran. Disamping itu, juga diuraikan tentang Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta Rencana Anggaran Tahun 2025.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab III ini menyajikan proses pengukuran kinerja yang meliputi penetapan indikator kinerja, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja. Setelah itu dilakukan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, dan realisasi anggaran.

BAB IV Penutup

Dalam Bab IV ini menyampaikan simpulan akuntabilitas kinerja dan rencana tindak strategis untuk meningkatkan kinerja.

Disamping Pengantar dan Batang Tubuh tersebut di atas, LKIP ini juga dilengkapi dengan Lampiran-lampiran: Rencana Kerja Tahunan (RKT), Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), Rencana Strategis (RS), Indikator Kinerja Utama (IKU), Revisi RPJMD 2024 – 2029.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

1. Pernyataan Visi

Visi adalah gambaran umum mengenai keadaan yang ingin dicapai dalam jangka panjang dengan perkataan lain, visi adalah sesuatu yang mengarahkan suatu masyarakat hendak dibawa dan diarahkan kemana.

Sejalan dengan kondisi yang ada dan permasalahan yang dihadapi, maka visi pembangunan daerah Kabupaten Sumba Barat Daya adalah :

Terwujudnya masyarakat Sumba Barat Daya yang maju, demokratis dan sejahtera dengan perubahan paradigma berfikir, unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki Etos kerja yang tinggi, dalam suatu gerakan bersama menuju masyarakat berkeadaban baru. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena – fenomena yang berkembang serta tuntutan reformasi, maka Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Barat Daya adalah :

Visi dan Misi Badan Kesbangpol Kabupaten umumnya berfokus pada terwujudnya stabilitas keamanan, integrasi bangsa, dan tata kelola pemerintahan yang kondusif. Misi utamanya meliputi penguatan ideologi Pancasila, peningkatan wawasan kebangsaan, pembinaan politik demokratis, serta peningkatan kewaspadaan dini terhadap konflik sosial untuk menciptakan situasi kondusif di tingkat daerah.

Berikut adalah poin-poin visi dan misi yang umumnya diterapkan:

Visi:

- Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, kondusif, demokratis, dan berwawasan kebangsaan.
- Terciptanya stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional yang mantap.

Misi:

- **Penguatan Ideologi dan Wawasan:** Meningkatkan ketahanan masyarakat melalui pementapan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila.
- **Stabilitas Politik & Demokrasi:** Meningkatkan kemandirian parpol, pendidikan politik, dan fasilitasi pemilu yang demokratis.
- **Kewaspadaan Nasional:** Meningkatkan kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial serta keamanan masyarakat.
- **Pemberdayaan Ormas:** Meningkatkan efektivitas, fungsi, dan partisipasi Ormas/LSM dalam kehidupan berbangsa.
- **Tata Kelola Pemerintahan:** Membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani.

Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Barat Daya sepenuhnya mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, RPJMD dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Barat Daya. Hal ini mengingat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan bagian integral atau unsure Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, maka selayaknya visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Barat Daya sepenuhnya mendukung visi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Untuk itu kedepan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Barat Daya berkeinginan menjadi pendukung, pendorong yang professional guna terwujudnya masyarakat yang tertib dalam berpolitik dan berwawasan kebangsaan.

2. Misi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian maka *Misi* Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Barat Daya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya aparatur.
2. Meningkatkan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama.
3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa.
4. Meningkatkan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat.
5. Meningkatkan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT).
6. Meningkatkan Pendidikan Politik Masyarakat.
7. Meningkatkan Kewaspadaan Dini Masyarakat

3. Penetapan Tujuan.

Penetapan tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Dengan penetapan tujuan maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Barat Daya dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Barat Daya dalam memenuhi visi - misi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu penetapan tujuan ini juga akan memungkinkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mengukur sejauh mana visi - misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Barat Daya telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan

visi misi organisasi. Untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai tujuannya maka ditetapkan indikator kinerja yang terukur. Untuk mengimplementasikan dan menjabarkan pernyataan misi, maka harus ditetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu yang biasanya ditetapkan 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sumber daya aparatur.
- b. Meningkatnya Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama.
- c. Meningkatnya Kesadaraan Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa.
- d. Meningkatnya Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat.
- e. Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT).
- f. Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat.
- g. Meningkatnya Kewaspadaan Dini kepada Masyarakat

4. Penetapan Sasaran.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Barat Daya mempunyai sasaran : 3

- | | | |
|-----------|---|--|
| Sasaran 1 | : | Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat; |
| Sasaran 2 | : | Meningkatkan kebebasan, kesetaraan dan kapasitas kelembagaan demokrasi, serta kewaspadaan dini di daerah dalam memelihara stabilitas sosial dan politik di Kabupaten Sumba Barat Daya; |
| Sasaran 3 | : | Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam memperkuat penyelarasankehidupan harmoni di Kabupaten Sumba Barat Daya. |

5. Penetapan Program

1. Kebijakan

Arah Kebijakan yang dilakukan sesuai dengan arah kebijakan umum daerah serta strategi prioritasnya adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur.
- b. Peningkatan kegiatan pembinaan Politik kepada Partai Politik, Organisasi Massa dan Masyarakat.
- c. Peningkatan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban .
- d. Peningkatan Pembinaan dan penyebarluasan informasi Partai Politik

2. Program

Beberapa Program yang dilakukan sesuai dengan arah kebijakan umum daerah dan strategi prioritasnya sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota.
- b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- c. Program Peningkatan Peran Partai dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

3. Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan arah kebijakan umum daerah dan strategi prioritasnya sebagai berikut :

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah Kebangsaan;
- b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
- c. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
- d. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
- e. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
- f. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
- g. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan

Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;

- h. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
- i. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
- j. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
- k. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
- l. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
- m. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
- n. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;

6. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Barat Daya 2025 disusun dengan mengacu pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Barat Daya. RKT tersebut telah ditindak lanjuti menjadi Penetapan Kinerja PK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Barat Daya 2025.

Tujuan, sasaran dan Program Kegiatan Strategis Penetapan Kinerja (PK) pada tahun 2025, sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	Persentase Pengurangan Konflik SARA, Persentase Organisasi, Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi Masyarakat Yang Bermitra Dengan Pemerintah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.205.430.448
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.133.839.772
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	133.901.500
Meningkatkan kebebasan, kesetaraan dan kapasitas kelembagaan demokrasi, serta kewaspadaan dini di daerah dalam memelihara stabilitas sosial dan politik di Kabupaten Sumba Barat Daya	Indeks Kinerja Ormas		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	383.811.000
	Indeks Kewaspadaan Nasional			
Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam memperkuat penyelaras kehidupan harmoni di Kabupaten Sumba Barat Daya	Indeks Harmoni Indonesia di Kabupaten Sumba Barat Daya		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	931.097.028

7. Perjanjian Kerja Tahun 2026

Penetapan Kinerja merupakan salah satu amanah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2026 merupakan tekad dan janji yang akan dicapai dalam tahun 2026. Penetapan Kinerja merupakan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam tahun 2026 dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.

Penetapan Kinerja (PK) Badan Kesbangpol pada tahun 2026, sebagai berikut:

NO	SASARANS TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA
1.	Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	Persentase Pengurangan Konflik SARA, Persentase Organisasi, Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi Masyarakat Yang Bermitra Dengan Pemerintah	100 %
2.	Meningkatkan kebebasan, kesetaraan dan kapasitas kelembagaan demokrasi, serta kewaspadaan dini di daerah dalam memelihara stabilitas sosial dan politik di Kabupaten Sumba Barat Daya	1 Indeks Kinerja Ormas	100 %
		2 Indeks Kewaspadaan Nasional	100 %
3.	Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam memperkuat penyelaras kehidupan harmoni di Kabupaten Sumba Barat Daya	Indeks Harmoni Indonesia di Kabupaten Sumba Barat Daya	100 %

8. Perencanaan Anggaran

Rencana Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tahun 2026 sebesar Rp. 3.793.394.999,00 terdiri dari :

No	Jenis belanja	Jumlah
1	Belanja Pegawai	1.302.559.474,00
2	Belanja Barang dan Jasa	1.403.864.469,00
3	Belanja Modal	-
4	Belanja Hibah	1.086.971.056,00
Jumlah		3.793.394.999,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PROSES PENGUKURAN KINERJA

Proses pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dalam pengukuran kinerja ini dilakukan dengan suatu metode atau proses yang meliputi yaitu:

1. Penetapan Indikator Kinerja

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran.. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi yaitu:

- a. Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- b. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- c. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap capaian program kegiatan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

2. Penetapan Kinerja

Langkah selanjutnya adalah penetapan indikator kinerja dan menetapkan rencana tingkat capaian (*target*) kinerja yang diinginkan, sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) tahun anggaran 2025 atau melalui penyalarsan RKT dan PK tahun anggaran 2026 dengan Perubahan Anggaran tahun 2026.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang direncanakan dengan realisasi kinerja kegiatan, program dan sasaran melalui media berupa Formulir PKK (*Pengukuran Kinerja Kegiatan*) dan formulir PPS (*Pengukuran Pencapaian Sasaran*).

Rumus perhitungan persentase pencapaian kinerja yaitu:

$$\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dari pengukuran kinerja ini akan menggambarkan pencapaian kinerja kegiatan dan program untuk mencapai tujuan SKPD / Unit yang telah ditetapkan.

Predikat penilaian capaian kinerja dikelompokkan dalam "*Skala Pengukuran Ordinal*" sebagai berikut:

No.	Skala Persentase Capaian Kinerja	Predikat
1	85 %-100 %	Sangat berhasil
2	70 %-84%	Berhasil Cukup
3	55 %-69 %	berhasil Tidak
4	<55 %	berhasil

B. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

Sebagaimana telah ditetapkan didalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Barat

Daya telah melakukan berbagai kegiatan strategis.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa :

No	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	99 %
2	Meningkatkan kebebasan, kesetaraan dan kapasitas kelembagaan demokrasi, serta kewaspadaan dini di daerah dalam memelihara stabilitas sosial dan politik di Kabupaten Sumba Barat Daya	100 %
3	Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam memperkuat penyelarasankehidupan harmoni di Kabupaten Sumba Barat Daya	99 %

C. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025 tercermin dalam pencapaian program atau sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh program atau sasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat

Dalam upaya mencapai sasaran tersebut ditetapkan 2 (dua) program dengan 6 (enam) kegiatan dengan 1 (satu) indikator kinerja. Pencapaian kinerja Nampak dalam indeks kualitas pelayanan public sebesar 99 % (sangat berhasil)

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
1	Persentase Pengurangan Konflik SARA, Persentase Organisasi, Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi Masyarakat Yang Bermitra Dengan Pemerintah	100	99	99

Sasaran 2 : Meningkatkan kebebasan, kesetaraan dan kapasitas kelembagaan demokrasi, serta kewaspadaan dini di daerah dalam memelihara stabilitas sosial dan politik di Kabupaten Sumba Barat Daya
 Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100 % Dalam usaha mencapai sasaran tersebut ditetapkan 2 (dua) program dengan 7 (tujuh) kegiatan dan 2 (dua) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian kinerja Nampak seperti dalam table berikut ini

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
1	Indeks Kinerja Ormas	100	100	100
2	Indeks Kewaspadaan Nasional	100	100	100
	Rata-rata	100	100	100

Dari 2 (dua) indikator sasaran tersebut berhasil mencapai target 100%.

Sasaran 3 : Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam memperkuat penyelaras kehidupan harmoni di Kabupaten Sumba Barat Daya

Dalam upaya mencapai sasaran tersebut ditetapkan 1 (satu) program kegiatan dengan 1 (satu) indikator kinerja. Pencapaian kinerja Nampak dalam indeks 99%.

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
1	Indeks Harmoni Indonesia di Kabupaten Sumba Barat Daya	100	99	99

Apabila dilihat dari rencana lima tahunan dalam Renstra, sampai dengan tahun ini **sasaran 1, 2 dan 3** mencapai target maksimal. Dari ketiga sasaran mencapai target maksimal Namun ada Faktor-faktor penyebab indikator sasaran tersebut yang belum mencapai target kinerja antara lain :

1. Keterbatasan jumlah Pegawai.
2. Kekurangan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas.
3. Terbatasnya sumber daya manusia

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kemampuan pengelolaan anggaran Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2025 dapat disampaikan melalui tabel berikut ini :

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih/ Kurang) (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	1.000.527.476	928.928.795		92,84
2	Belanja Barang dan jasa	1.695.374.250	1.673.291.534		98.70
3	Belanja Modal	-	-		-
4	Belanja Hibah	1.092.178.022	1.092.178.022		100
Jumlah					

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa rata-rata kinerja realisasi pelaksanaan anggaran mencapai 97,53 % atau termasuk **sangat berhasil**. Pencapaian realisasi anggaran tersebut belum sesuai dengan yang direncanakan yakni 100%, dikarenakan alur belanja yang dilakukan belum berjalan dengan baik dan beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

Tabel 1
Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumba Barat Daya
Tahun 2024 – 2025

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Tahun 2019	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cakupan Koordinasi di Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ikhad an Sejarah Kebangsaan	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
2	Cakupan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
3	Cakupan Ormas di Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya yang terdaftar (%)	37,50%	50,00%	62,50%	75,00%	87,50%	100%	100%
4	Cakupan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah.	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
5	Cakupan Kegiatan Pembinaan Kehidupan dan Kerukunan Umat Beragama	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
6	Cakupan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Kabupaten	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%

Tambolaka, 26 Januari 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,


Ir. HERMAN GONGGOTE, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19660908 199303 1 013